



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No.1 Bukit Biru ☎ (0541) 661350 Tenggarong 75511

Website : diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id Email : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

RAHASIA

Nomor : R-645/DISKOMINFO/TIK-SANDI/046/08/2021 Tenggarong, 20 Agustus 2021
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian
Pemkab Kutai Kartanegara T.A 2020

Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tentang Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara T.A 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Ir. H. Bahteramsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – di Tenggarong
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – di Tenggarong

RAHASIA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No.1 Bukit Biru ☎ (0541) 661350 Tenggarong 75511

Website : diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id Email : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

RAHASIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa pelaksana urusan persandian dilaksanakan oleh Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan Keamanan Informasi e-Government, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan penyelenggaraan layanan monitoring trafik elektronik;
2. Merencanakan penyelenggaraan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
3. Merencanakan penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Informasi;
4. Merencanakan penyelenggaraan pelaksanaan Audit TIK;
5. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Seksi Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Seksi Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Seksi Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Tenggarong, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Ir. H. Bahteramsyah, MM.

NIP. 19620327 198603 1 023

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Dasar Hukum	4
B. Tujuan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020...	
A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	5
B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan pada Seksi Persandian.....	7
C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah	8
BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*
6. *Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika*

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II
HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 (satu) program kerja dan 3 (tiga) kegiatan. Program Kerjanya adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Serta Kegiatannya adalah 1. Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian, 3. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara. Sesuai dengan data pada Tabel Realisasi Kegiatan di bawah ini, kegiatan yang bisa terealisasi adalah 1. Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan keluaran kegiatan Aplikasi, dari 4 (empat) aplikasi yang akan diajukan maka tidak ada aplikasi yang dapat terealisasi karena adanya COVID-19 sedangkan untuk MoU (Memorandum of Understanding) tidak dilaksanakan mengingat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pernah melaksanakan MoU dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), 2. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara dengan keluaran kegiatan Jumlah Peralatan Sandi Negara 6 Unit tetapi tidak dapat terealisasi karena adanya Pandemi COVID-19, 3. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian dengan keluaran kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi ada 1 (satu) OPD tetapi mendapat tambahan 15 OPD Kantor Camat . Dari 3 (tiga) Kegiatan ada perubahan anggaran dan yang dapat terlaksana atau dengan capaian %.

Tabel Realisasi Kegiatan

1. Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

No	Keluaran Kegiatan	Jumlah	Realisasi	% Capaian
1	Aplikasi	4	0	0%
2	MoU (Memorandum of Understanding)	1	0	0%
Total		5	0	0%

2. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara

No	Keluaran Kegiatan	Jumlah	Realisasi	% Capaian
1	Peralatan Sandi Negara	6	0	0%
Total		6	0	0%

3. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian

No	Keluaran Kegiatan	Jumlah	Realisasi	% Capaian
1	Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi	1	1	100%
Total		1	1	100%

Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Seksi Persandian Tahun 2020

1. Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	%
1	Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Rp30.302.820,- (Perubahan)	Rp28.428.420,-	93,81%
Total		Rp30.302.820,-	Rp28.428.420,-	93,81%

2. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	Rp525.000,- (Perubahan)	Rp525.000,-	100%
Total		Rp525.000,-	Rp525.000,-	100%

3. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	Rp48.683.100,- (Perubahan)	Rp43.858.925,-	90,09%
Total		Rp48.683.100,-	Rp43.858.925,-	90,09%

Sesuai dengan Tabel di atas, terdapat Perubahan Anggaran, maka anggaran yang terealisasi dalam melaksanakan kegiatan: 1. Penetration Testing (PENTES) dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dari yang dianggarkan Rp30.302.820,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), maka yang dapat terlaksana / terealisasi adalah Rp28.428.420,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau (93,81%) dari total anggaran,

2. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara, dari yang dianggarkan Rp525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), maka yang dapat terlaksana / terealisasi adalah Rp525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau (100%) dari total anggaran,

3. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian, dari yang dianggarkan Rp48.683.100,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah), maka yang dapat terlaksana / terealisasi adalah Rp.43.858.925,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau (90,09%) dari total anggaran .

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan pada Seksi Persandian

1. Pada kegiatan *Penetration Testing (PENTES) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)* pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel dibawah ini, yaitu:

	Program Kerja	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp30.302.820,-	Rp28.428.420,-	93,81%

2. Pada kegiatan *Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara* pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel dibawah ini, yaitu:

	Program Kerja	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp525.000,-	Rp525.000,-	100%

3. Pada kegiatan *Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian* pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel dibawah ini, yaitu:

	Program Kerja	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp48.683.100,-	Rp43.858.925,-	90,09%

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tidak jadi terlaksana kegiatan PENTES (Penetration Testing) tahun 2020	Pada Tahun 2021 sudah melaksanakan PENTES pada 3 (tiga) Aplikasi yang tidak terlaksana pada Tahun 2020
2	Kurangnya personel pada Seksi Persandian	Pada Tahun 2021 atau 2022 merencanakan agar ada penambahan personel / staf pada Seksi Persandian agar dapat membantu kegiatan pada Seksi Persandian
3	Kurangnya SDM yang berkualifikasi Sandi	Ada 1 (satu) personel yang berkualifikasi Sandiman Dasar dan rencananya akan mengirim personel ikut Diklat Persandian pada Tahun 2021 atau 2022 agar nanti bisa membantu tenaga yang berkualifikasi Sandi yang sudah ada
4	Tidak adanya ruang khusus Persandian	Pada Tahun 2021 atau 2022 rencananya akan membangun ruang khusus Persandian
5	Pandemi COVID-19 yang menghambat jalannya kegiatan	Bila COVID-19 telah hilang rencananya Tahun 2021 atau 2022 akan melaksanakan kegiatan lebih optimal

BAB III
PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Tabel Kegiatan Seksi Persandian Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	Tahun 2021
2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	Tahun 2021
3.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	Tahun 2021
4.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	Tahun 2021
5.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	Tahun 2021

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan walaupun kurang optimal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya kegiatan Penetration Testing (PENTES) di Kabupaten Kutai Kartanegara antara Tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Belum terlaksanakannya kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Sudah terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian
4. Karena adanya Pandemi COVID-19 maka banyak kegiatan Persandian yang tidak terealisasi

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:
 - a. Agar Kemendagri langsung meninjau ke lapangan supaya mengetahui kondisi Pemerintahan urusan Persandian di seluruh Kabupaten / Kota
 - b. Supaya Kemendagri memberikan Pembinaan Persandian kepada seluruh Kabupaten / Kota agar tercipta kesadaran pentingnya keamanan informasi
2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:
 - a. BSSN sebaiknya memberikan sejenis pelatihan dan bimtek tentang Siber dan Sandi kepada ASN daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Persandian
 - b. BSSN sebagai induk Siber dan Sandi Indonesia agar membantu Persandian Kabupaten / Kota untuk mengamankan informasi
3. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi :
 - a. Pemerintah Provinsi agar mengadakan pertemuan Persandian dengan Kabupaten / Kota seluruh Provinsi supaya bisa saling melengkapi dan tukar informasi tentang Persandian
 - b. Pemerintah Provinsi supaya meneruskan kepada Persandian Kabupaten / Kota terkait berita / surat penting dari Kemedagri / BSSN
4. Dikarenakan sangat pentingnya pokok persoalan diatas mohon dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi COVID-19

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.	TIDAK ADA			
2.				
3				

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. H. Bakheramsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA URUSANPERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020
FORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM SANDI

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SOFYAN AGUS, ST	0541664507	-
2	MURJANTI, SE	0541664507	-
3	SUGENG NURHUDA, A.Md	0541664507	-
4	SYAFARUDDIN NUR	0541664507	-

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/GOL.RUANG	TMT		JABATAN	TMT	
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	19751217 200112 1 008	Penata Tingkat I / (III/d)	Oktober	2014	Kasi Persandian	November	2019
2	19730910 201212 2 001	Penata / (III/c)	April	2021	Pengolah Data	April	2021
3	19830508 201101 1 001	Penata Muda / (III/a)	Oktober	2020	Pengolah Data	Oktober	2020
4	THL	-	-	-	Tenaga Administrasi	April	2020

C. DATA PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN		PELATIHAN DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI / PERSANDIAN		SERTIFIKASI DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI	
	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Strata1	2001	-	-	-	-
2	Strata1	1998	-	-	-	-
3	Diploma 3	2006	Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar	2014	-	-
4	SMA	2002	-	-	-	-

D. DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHARGAAN

NO	PENGHARGAAN PERSANDIAN ATAU KEAMANAN INFORMASI		TUNJANGAN PENGAMATAN PERSANDIAN		TUGAS LAIN DILUAR URUSAN PERSANDIAN
	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN	DAPAT	TIDAK DAPAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	V	-
2	-	-	-	V	-
3	-	-	-	V	-
4	-	-	-	V	-

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Ir. H. Bahteramsyah, MM
NIP.19620327 198603 1 023

RAHASIA

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops SOTTO	Penggunaan (AGTG)
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	Laptop Fujitsu	1 Unit	Y000694	673				D232.02/HARKAN/118/03/2017	23Maret2017	B	-	-
2.	Peralatan / Mesin Sandi	-	-	-				D232.01/ /2012	26 Juli 2012	B	-	-
3	Peralatan Sandi	-	-	-				D232.01/1021/11/2013	Nopember 2013	B	-	-
4	Peralatan Sandi	-	-	-				D232.01/280/10/2014	Oktober 2014	B		

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


H. H. Bahderamsyah, MM
NIP. 19820327 198603 1 023

RAHASIA

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

KUNCI SISTEM SANDI												
NO	PALSAN	MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST	MASA BERLAKU			KET	
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN		TGL	BB	SB		TB
1.	Kunci Sistem Sandi	Bahan dan Kunci Sistem Sandi 2014	-	1 paket	-	-	002.2015/TTs/Kemendagri /Pemkab Kutai Kartanegara	14 April 2015				
2.	Kunci Sistem Sandi	Bahan dan Kunci Sistem Sandi 2016	-	1 paket	-	-	004.2016/TTs/Kemendagri /Pemkab Kutai Kartanegara	30 Maret 2016				
3.	Kunci Sistem Sandi	Bahan dan Kunci Sistem Sandi 2017	-	1 paket	-	-	051.2017/TTs/Kemendagri /Pemkab KutaiKartanegara	6 September 2017				

4.	Kunci Sistem Sandi	Bahan dan Kunci Sistem Sandi 2018	-	1 paket		-	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	15 November 2018				
----	--------------------	-----------------------------------	---	---------	--	---	---------------------------------	------------------	--	--	--	--

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. H. Baberamsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

LAMPIRAN V

RAHASIA

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN		KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL		(B/R)	(AG/TG)	
1.	Jammer CPM HPRC 6B	4353	65	1 Unit	-	-	-	R.BA.76/LSN/PP.06.02/03/2017	22 Maret 2017	B	-	-	-

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


J. H. Baitaramsyah, MM
NIP. 19620627 198603 1 023

LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.	SIMRAL	Strategis	Diskominfo	Firewall Fortigate 1500D	BSSN	2019	-	-	V
2.	TUKIN / EKin	Strategis	BKPSPDM	Firewall Fortigate 1500D	BSSN	2019	-	-	V
3.	SIAPDA	Strategis	Bapenda	Firewall Fortigate 1500D	BSSN	2019	-	-	V

Keterangan:

- * Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. H. Badieramsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 2020

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi	-	√	-	-	-
2.	Jadwal Retensi Arsip	-	√	-	-	-
3.	Pemusnahan Arsip	-	√	-	-	-
4.	Permintaan Informasi/Dokumen	-	√	-	-	-
5.	Distribusi informasi/dokumen	-	√	-	-	-

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Ir. H. Bahteramsyah, MM
KUPR.19620327 198603 1 023

LAMPIRAN VIII

RAHASIA

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.					
3					

Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdnas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. H. Bahderamsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

RAHASIA

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.				
dst				

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

~~Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika~~



Ir. H. Bahneramsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

RAHASIA

LAMPIRAN X

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE / ELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses			Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet	
1.	E-Telex	√	-	-	-	-	√	-	√	
2.										
dst										

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik , misal e-surat)

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



RAHASIA

LAMPPIRAN XI

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Administrasi		
	a. Sarana Pengolah Data <ul style="list-style-type: none"> - Desktop - Laptop - Scanner 	1 (Laptop)	Baik
	b. Sarana Penyimpan Data <ul style="list-style-type: none"> - Hardisk - Flashdisk - CD - Box File - Brankas - Filling Cabinet - Lemari 	1	Baik
	c. Sarana Komunikasi		

	<ul style="list-style-type: none"> - Telepon - Faksimili - Sarana Internet - Radio <p>d. Sarana Pencetak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Printer - Mesin Foto Copy <p>e. Sarana Tulis Menulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ballpoint - Pensil - Penghapus - Spidol - Buku Kerja - Papan Tulis <p>a. Sarana Penghancur Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Penghancur Kertas - Palu - Sarana Pembakaran - Gunting 	-	-	-
		Ada	Baik	
		-	-	
		1	Baik	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
2	Sarana Kerja Kasa	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Sandi - Telepon SLJ - Faksimili 	-	-	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Internet - Jaringan Telepon 	-	-	
3	Sarana Strong Room <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) 	-	-	-
4	Sarana Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	-	-	-
	Sarana Pengamanan Fisik <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Akses Kontrol <ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) b. Pengamanan Terhadap BahayaKebakaran 	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none">- Sensor Pendeteksi Api(fire detector)- Alarm Kebakaran- Automatic SprinklesSystem- Tabung Pemadam Api <p>c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup</p> <ul style="list-style-type: none">- Kamera Monitor (CCTV)- Piket Jaga	-	-	-
--	--	---	---	---

Tenggarong, 20 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


I. H. Santieramsyah, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);